

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amrullah, M. Arief, 2018, *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta;
- Asyhadie, Zaeni, et al, 2012, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Erlangga, Jakarta;
- Bawono, Bagus SD Nur, et al, 2021, *Running a Company Under Indonesian Laws*, PT Rajagrafindo Persada, Depok;
- Fajar, Mukti, et al, 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Hamzah, Andi, 2021, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Hiariej, Eddy O.S, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta;
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung;
- Kristian, 2018, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta;
- Muladi, et. al, 2010, *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”*, Prenadamedia Group, Jakarta;
- Mulhadi, 2017, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Moeljatno, 2008, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Pramono, Nindyo, 2013, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Andi, Yogyakarta;
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung;

Supramono, Gatot, 2020, *Hukuman Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta;

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta;

Soekanto, Soerjono, *et al*, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok;

Sjahdeini, Sutan Remy, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta;

Sjahdeini, Sutan Remy, 2017, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, Kencana, Depok;

Sulistiowati, 2013, *Tanggung Jawab Hukum pada Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta;

Swantoro, Herri, 2019, *Hukum Perseroan Terbatas & Ancaman Pailit*, Rayyana Kominukasindo, Jakarta.

#### **Artikel Jurnal**

Paraanugrah, Marzha Tweedo Dikky, “*Transplantasi Teori Reverse Piercing The Corporate Veil dalam Perseroan Terbatas di Indonesia*”, *Lex Renaissance*, No.2, Vol.4, Juli 2019.

#### **Hasil Penelitian/ Tugas Akhir**

Paraanugrah, Marzha Tweedo Dikky, 2020, “*Transplantasi Teori Reverse Piercing The Corporate Veil dalam Perseroan Terbatas di Indonesia*”, Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

#### **Internet**

FATF, “*FATF guidance Transparency And Beneficial Ownership*”, <https://www.fatf-gafi.org>, diakses 05 Desember 2023.

Lex Crimen, “Hukuman Tambahan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9805>, diakses 22 Maret 2023.

Yuridika, “Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, <https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/download/350/184/588>, diakses pada tanggal 22 Maret 2023

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23);

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1492);

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 710);

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3099 K/Pdt/2017, perihal Putusan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas atas nama PT Wijaya Cipta Perdana, 16 Januari 2018.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesias Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021, perihal Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Heru Hidayat, 24 Agustus 2021;

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 45/PID.SUS/TPK/2013/PN.BKL, perihal Putusan Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Andi Wijaya bin Suparmin, 30 April 2014;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST, perihal Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Setya Novanto, 24 April 2018;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 65 /Pid.Sus/TPK/2018/PN JKT.PST. perihal Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung, 5 Desember 2018;